

BAB I

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam posisi yang sejajar antara satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Melalui sistem ini, rakyat mempunyai hak yang sebebaskan-bebasnya untuk menentukan sendiri pilihannya, baik itu dalam pemilihan umum presiden maupun pemilu legislatif yang nantinya akan memimpin dan menempati lembaga-lembaga perwakilan suatu Negara. Pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya suatu

proses demokratisasi suatu Negara dimana indikatornya bisa dilihat dari beragamnya partai-partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Banyaknya partai politik yang muncul juga akan menyebabkan banyaknya ideologi yang kemudian menjadi dasar pemikiran mereka dalam memainkan peran politiknya. Selain ideologi yang berbeda-beda, setiap partai politik juga mempunyai tokoh pemimpin masing-masing sebagai *bargaining position* untuk memperkuat pengaruhnya di kancah politik dan diharapkan mampu memimpin negaranya menjadi lebih maju baik dalam bidang politik, sosial dan terutama di bidang ekonomi.

Salah satu Negara di Eropa yang menganut sistem demokrasi adalah Perancis. Di Perancis, politiknya sangat khas dengan dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok sayap kiri yang bertumpu pada Partai Sosialis dan kelompok sayap kanan yang bertumpu pada Partai Union for a Popular Movement (Union pour un Mouvement Populaire) yang selanjutnya disingkat UMP¹. Terdapat juga sebuah partai sayap kanan radikal yang bernama Front National. Selain itu, di Perancis juga banyak terdapat partai-partai kecil yang ikut serta meramaikan suasana politik di Negara beribukota Paris itu.

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Presiden Perancis 2007 berlangsung pada tanggal 22 April 2007 untuk memilih Presiden Perancis untuk periode masa kerja lima tahun kedepan. Apabila tidak ada kandidat yang berhasil memenangkan 50% atau lebih

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/European_France, diakses pada tanggal 22 September 2007

suara, pemilu putaran kedua akan dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2007. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Perancis Pasal 7. Pemilu kali ini merupakan pemilu ke-9 di Republik Ke-5 Perancis dan merupakan pemilu yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Perancis karena masa depan Perancis sangat ditentukan dalam pemilu ini. Sepertiga dari 44 juta warga Perancis dinyatakan memiliki hak untuk memilih dan mereka menyatakan kebingungan untuk menjatuhkan pilihan mereka. Hal ini mengingatkan warga Perancis terhadap peristiwa yang terjadi pada pemilu presiden tahun 2002 lalu. Saat itu, Jacques Chirac dan Lione Josephine berada di tingkat teratas dalam perolehan suara meninggalkan para kandidat lainnya. Namun secara mendadak, perolehan suara Jean Marie Le Pen meningkat tajam hingga berhasil menggeser posisi Josephine di peringkat kedua. Akhirnya, Chirac dan Le Pen. memasuki pemungutan suara kedua. Jika Chirac berhasil mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Perancis untuk kedua kalinya setelah proses pemungutan suara tahap kedua, hal itu dikarenakan kekhawatiran warga Perancis terhadap berkuasanya Le Pen yang dikenal sebagai tokoh yang anti-orang asing.

Pada pemilu kali ini, warga Perancis kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit seperti yang mereka saksikan pada pemilu sebelumnya. Hingga kini, tak satu pun dari dua kandidat dari sayap kanan dan kiri yang mampu menggalang suara mayoritas warga. Dua partai yang berkuasa di Perancis yaitu Partai UMP dan Partai Sosialis, terbukti gagal dalam memulihkan kondisi ekonomi dan sosial Perancis selama 12 tahun terakhir. Baik pada masa pemerintahan Jaques Chirac yang tinggal di Palais de l' Elysées sejak tahun 1995, maupun Partai Sosialis yang

menguasai parlemen antara tahun 1997 hingga 2002, gagal menyelesaikan kendala sosial dan ekonomi Perancis. Salah satu faktor kesuksesan Jean-Marie Le Pen, dalam pemilu presiden tahun 2002 adalah ketidakpercayaan warga terhadap kinerja dua partai berkuasa Perancis.

Pada tahun 2005, dukungan rakyat Perancis terhadap partai pemerintah yaitu UMP, menunjukkan penurunan, dan sebaliknya dukungan terhadap Partai Sosialis semakin meningkat. Penurunan dukungan rakyat Perancis kepada Pemerintah ditandai dengan penolakan rakyat Perancis terhadap Konstitusi Uni Eropa pada referendum 29 Mei 2005. Penolakan rakyat Perancis tersebut juga dianggap sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap kegagalan Pemerintah mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi Perancis. Hasil referendum tersebut berakibat pengunduran diri PM Jean-Pierre-Raffarin yang digantikan oleh Mantan Menlu Dominique de Villepin pada tanggal 2 Juni 2005.

Penurunan dukungan rakyat Perancis kepada partai Pemerintah juga di sebabkan oleh kerusuhan imigran yang dipicu oleh tewasnya dua remaja keturunan Afrika yaitu Ziad Benna dan Banou Traoré pada tanggal 27 Oktober 2005 di kota Clichy-sous-Bois, sebuah kawasan pinggiran (*banlieue*) di dekat Paris. Mereka tewas karena terkena sengatan listrik ketika memanjat sebuah gardu listrik dan bersentuhan dengan sebuah transformer. Kedua remaja tersebut mencoba lari dari dua petugas polisi yang sedang melakukan pemeriksaan identitas. Remaja ketiga juga terluka namun selamat. Kerusuhan kemudian pecah setelah diketahui bahwa remaja yang meninggal berasal dari etnis minoritas di distrik yang berpenghasilan rendah. Kerusuhan tersebut merupakan yang terburuk

di Perancis setelah kerusuhan tahun 1980 dan Mei 1968. Peristiwa itu menyulut kemarahan komunitas imigran dan menjadi ajang pelampiasan kemarahan serta kekecewaan komunitas minoritas terhadap pemerintah. Selama ini pemerintahan Presiden Jacques Chirac dianggap kurang memberikan perhatian kepada minoritas imigran, termasuk di dalamnya komunitas Muslim². Kerusuhan tersebut merupakan kerusuhan terbesar setelah kerusuhan imigran yang sama pada tahun 1980.

Puncak dari ketidakpuasan rakyat Perancis terhadap pemerintah terjadi pada bulan November 2005. Jutaan rakyat Perancis berdemonstrasi di jalan menentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang diberi nama Contrat Première Embauché atau yang kemudian disingkat dengan CPE yang artinya Kontrak Kerja Tahap Pertama. Alasan utama penolakan rakyat Perancis dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa aturan tersebut akan mengubah total sistem pasar ketenagakerjaan yang sebelumnya dianggap terlalu rigid karena bersifat *over protective* terhadap kepentingan buruh. Dengan peraturan baru tersebut, ketenagakerjaan diarahkan menjadi lebih fleksibel (*labour market flexibility*) yang bermakna hilangnya proteksi Negara atas kaum buruh. Sebaliknya, tentu keleluasaan bagi pengusaha untuk melakukan pemberhentian (*dismissal*) khususnya bagi para pekerja yang berusia dibawah 26 tahun, selama dua tahun pertama masa kontrak³.

² Luki Aulia, "Disintegrasi (Masih) Mengganjal Perancis," *Kompas*, 22 Januari 2007

³ Yuri Alfrin Aladdin, "Pergolakan Buruh atas Kebijakan Pemerintah Belajarlah dari Kasus Perancis," *Sinar Harapan*, 7 April 2006.

Selama ini, kampanye presidensial yang dilakukan di Perancis belum pernah menyita perhatian yang amat besar di luar negara Perancis sendiri sejak kampanye pemilu tahun 1981 yang melahirkan koalisi Sosialis dan Komunis dibawah pimpinan François Mitterand. Secara keseluruhannya, kali ini dunia lebih tertarik pada proses pemilunya dibandingkan dengan hasilnya kelak.

Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Perancis tahun 2005 lalu membuat rakyat Perancis semakin berhati-hati memilih calon Presiden. Kecemasan itu terutama sangat dirasakan oleh para imigran Perancis yang mayoritas menjadi buruh. Mereka sangat trauma dengan tragedi itu.

Analisa yang berkembang di Perancis memprediksikan persaingan ketat antara Sarkozy dan Royal. Kedua kandidat tersebut dalam berbagai jajak pendapat selalu berada di tingkat teratas meninggalkan 10 pesaing mereka. Namun perlu ditekankan pula bahwa peningkatan gradual popularitas Francois Bayrou, Ketua Partai Union pour la Démocratie Française atau disingkat UDF yang terus bergerak mendekati Sarkozy dan Royal, membuyarkan seluruh prediksi dan analisa yang ada. Bahkan sejumlah pengamat menilai hasil pemilu presiden Perancis tahun ini sangat sulit untuk diprediksi. Alasannya, peningkatan popularitas Bayrou selalu disertai dengan menurunnya dukungan terhadap Royal. Bayrou berusaha tampil sebagai sosok politisi sosial demokrat dengan cara membuka front dengan Sarkozy dan menghindari konfrontasi dengan kelompok sayap kiri. Sejauh ini, strategi kampanye Bayrou cukup efektif dalam meningkatkan popularitasnya. Meski demikian, Royal dan Sarkozy tetap berada dalam gelanggang utama pemilu. Tetapi hasil jajak pendapat tidak dapat dijadikan

pedoman tentang siapa yang akan menjadi Presiden Perancis mendatang, mengingat opini umum tampak bimbang untuk menentukan pilihan mereka.

Sangat sulit diprediksikan siapakah yang akan memenangkan pemilu presiden Perancis kali ini. Dari berbagai polling yang dilakukan oleh lembaga polling Perancis yaitu Ipop, Louis-Harris, Ipsos, TNS-Sofres, BVA dan CSA dari tanggal 18 Oktober 2006 – 20 April 2007, memang ada kecenderungan bahwa Nicolas Sarkozy dari partai UMP tetap akan masuk pada putaran kedua. Namun untuk rival Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden putaran kedua, ada dua calon kandidat terkuat yaitu Segolene Royal dari Partai Sosialis dan Francois Bayrou dari Partai UDF. Apabila yang menjadi rival Nicolas Sarkozy nantinya adalah Segolene Royal maka bisa dipastikan melalui polling tersebut, Sarkozy lah yang akan memenangkan pemilu. Namun apabila rival Sarkozy nantinya adalah Bayrou, maka Nicolas Sarkozy akan kalah mutlak. Dari polling tersebut apabila Nicolas Sarkozy disandingkan dengan Bayrou maka kemenangan akan berada di tangan Bayrou, karena Partai Sosialis akan mendukung Bayrou pada pemilu presiden putaran kedua nanti.

Setelah melakukan pemilu pada tahap pertama pada tanggal 22 April 2007, Dewan Konstitusi mengumumkan secara resmi hasil pemilihan. Hasilnya terpilihlah dua kandidat terkuat calon Presiden Perancis yaitu Nicolas Sarkozy dan Segolene Royal. Mereka merupakan calon presiden Perancis yang memiliki pendukung yang sangat banyak. Pada pemilu putaran pertama, Sarkozy meraih suara sebanyak 31,18% (11,448,663 suara) dan Segolene Royal meraih suara sebanyak 25,87% (9,500,112 suara). Sedangkan dua kandidat terkuat yang lain

yaitu Francois Bayrou dari Partai UDF yang mendapatkan suara sebanyak 18.57% dan Jean-Marie Le Pen dari Partai National Front memperoleh suara sebanyak 10.44%⁴.

Pemilu putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2007 merupakan pemilu Perancis yang sangat mendebarkan. Masing-masing pendukung Sarkozy dan Royal berharap idolanya berhasil menjadi Presiden Perancis untuk 5 tahun yang akan datang. Namun setelah melakukan pemilu putaran kedua tersebut, Royal ternyata harus mengakui kekalahannya atas Sarkozy yang menang dengan perolehan suara sebanyak 53,06% (18.983.408 suara). Royal sendiri memperoleh suara 46,94% (16.790.611 suara)⁵. Kemenangan mutlak itu akhirnya memutuskan bahwa Nicolas Sarkozy tampil sebagai Presiden baru Perancis menggantikan Jacques Chirac, seorang tokoh konservatif Perancis yang sudah berkuasa selama 12 tahun.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik adalah :

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan Nicolas Sarkozy sehingga ia terpilih sebagai presiden Perancis pada Pemilu Presiden tahun 2007

⁴ *Pemilu Presiden Perancis 2007*, (diakses 12 September 2007); diambil dari http://forumpolitisi.org/pusat_data/parlemen/article.php?id=433

⁵ Perancis Punya Presiden Baru, *Kompas*, 7 Mei 2007.

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori merupakan acuan dan pedoman yang dapat mengarahkan suatu penelitian menjadi lebih empiris dengan menunjukkan fakta dan hubungan yang terjadi sehingga suatu permasalahan dapat terjawab. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, artinya berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada fenomena yang terjadi. Teori mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang saling berhubungan. Konsep merupakan abstraksi yang menjelaskan suatu obyek. Untuk mengeksplanasikan permasalahan di atas penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut:

1. Konsep Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik, pemilihan umum adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut baik eksekutif, legislatif, yudikatif hingga pemerintahan daerah.⁶ Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen. Para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye kepada konstituen. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan sampai menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan kemudian disosialisasikan ke para pemilih.

⁶Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Ada beberapa tipe pemilu yang diterapkan oleh Negara-negara demokrasi saat ini, yaitu Presidential election, General election, Primary election, By-election, Local election dan Co-option.⁷ Salah satu tipe pemilu di atas yang sangat penting adalah Presidential election. Presidential election atau pemilu presiden adalah suatu proses penentuan jabatan kepresidenan dengan cara pemungutan suara oleh pemilih (konstituen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu presiden yang dilakukan secara langsung dianggap lebih baik dibandingkan dengan pemilu presiden yang dilakukan secara tidak langsung karena Pemilu presiden yang dilakukan secara langsung merupakan pilihan dari konstituen itu sendiri. Sedangkan pemilu presiden yang dilakukan secara tidak langsung merupakan pilihan yang bersifat representatif.

Perancis merupakan Negara penganut sistem multi partai yang menggunakan jenis sistem pemilihan umum yaitu Sistem Dua Putaran (SDP) untuk memilih Presiden. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Perancis Pasal 6 dan Pasal 7 tahun 1958 mengenai pemilu presiden secara langsung dan pemilihan dengan sistem dua putaran.⁸ Presiden merupakan jabatan tertinggi di Perancis dan memiliki kekuasaan penuh untuk memilih Perdana Menteri.

Hingga kini Perancis adalah satu-satunya sistem presidensial dalam jajaran sistem-sistem parlementer Eropa lainnya. Banyaknya partai di Perancis menyebabkan banyak pula calon atau kandidat Presiden yang dicalonkan oleh masing-masing partai tersebut. Oleh karena itu, jenis SDP merupakan sistem

⁷ *Types of election*, diakses melalui <http://en.wikipedia.org/wiki/Election>, tanggal 20 Oktober 2008

⁸ Debbasch & Pontier, *UUD Perancis (Les Constitutions de la France)*. Paris, Dalloz, 1989.

pemilu yang tepat diterapkan di Negara Perancis, sehingga kandidat yang maju pada putaran kedua merupakan mereka yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama. Kedua kandidat tersebut kemudian akan bersaing kembali memperoleh suara terbanyak untuk memperoleh kursi Presiden.

2. Teori Pemilih

Dalam melakukan kampanye, partai politik berusaha menarik dukungan sebanyak-banyaknya. Program-program atau kebijakan-kebijakan utama yang ditawarkan atas tuntutan atau isu-isu yang berkembang di masyarakat diusahakan semaksimal mungkin mampu mempengaruhi pilihan pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Anthony Downs menyatakan dalam teori pemilihnya bahwa “*pemilih (konstituen) akan menggunakan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kandidat yang diinginkan oleh mereka terhadap pemerintah dan pilihannya tersebut sangat didasarkan dengan kepentingan mereka sesuai dengan posisinya dalam masyarakat*”⁹. Preferensi semata-mata merupakan hasil kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam tujuan jangka pendek partai, yaitu memenangkan pemilu. Pemilih adalah rasional, akan tetapi memiliki sedikit informasi mengenai hubungan antara pilihannya dan kebijakan yang diusulkan oleh yang lain. Pilihannya, yaitu memilih kandidat yang memiliki program kebijakan paling sesuai dengan kepentingan mereka.

⁹ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, (New York : Harper and Row, 1995) hal. 174.

Dalam hubungan antar pemilih dan kandidat, Downs mengungkapkan asumsinya bahwa kandidat berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dalam pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya mereka harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan permintaan dan keinginan dari pemilih daripada mengeluarkan program kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Isu yang berkembang juga mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu¹⁰. Kandidat akan mudah mendapatkan banyak suara apabila mampu memajemen isu yang berkembang yang disertai dengan mengeluarkan program kebijakan yang memberikan solusi terbaik atas isu tersebut. Selain itu, pemilih juga melihat apakah kandidat yang mencalonkan diri mempunyai skandal atau tidak, karena apabila memiliki skandal akan mendapatkan kesulitan membangun citra baik di tengah publik.

Dalam debat maupun kampanye, Nicolas Sarkozy lebih memfokuskan masalah dalam negeri terutama masalah imigrasi yang menjadi faktor utama menurunnya perekonomian Perancis. Dalam usahanya untuk memperoleh suara terbanyak, Nicolas Sarkozy menawarkan program-program kebijakan yang sangat solutif untuk mengatasi permasalahan dalam negeri Perancis tersebut, baik untuk rakyat Perancis itu sendiri maupun untuk para imigran.

Nicolas Sarkozy merupakan politikus yang memiliki eksistensi yang sangat tinggi. Kinerjanya sangat baik dan rakyat Perancis mengenalnya sebagai tokoh pembaharuan. Dalam pemerintahan Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy memegang jabatan-jabatan penting. Walaupun berasal dari partai yang sama

¹⁰ Robert Michels, *Political Parties* (The Free Press of Glancoe, 1958) hal. 304-305

dengan Jacques Chirac, namun pemikiran Sarkozy tidak selalu sama. Sarkozy bahkan cenderung kontra dengan kebijakan Jacques Chirac yang dinilai kurang efektif mengatasi masalah Perancis. Dalam kampanyenya, ia berusaha meyakinkan rakyat Perancis agar memilihnya dengan memberikan program-program kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah di Perancis.

3. Konsep Partai Politik

Robert Michels mendefinisikan partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik yang mempunyai fungsi utama yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan¹¹. Partai-partai politik merupakan aktor-aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan.

Dalam pemilu, partai menggunakan ideologi untuk memobilisasi massa. Ideologi digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan guna memudahkan pemilih menentukan pilihannya. Pemilih memilih suatu partai karena kesamaan ideologinya sehingga timbul rasa kesetiaan dan kecintaannya pada partai tersebut. Selain itu, ideologi juga berfungsi sebagai alat untuk memudahkan para pemilih mengetahui bagaimana keinginan dan kepentingan mereka dapat terpenuhi oleh sebuah partai dalam pemilihan umum¹².

Dalam hubungannya dengan kandidat, pemilih melihat partai asal kandidat yang mengusungnya sebagai referensi dalam menentukan pilihannya pada

¹¹ Robert Michels, *Partai politik : Kecenderungan Oligarkhis dan Birokrasi* (Jakarta: CV.Rajawali,1984), hal.92.

¹² Salisbury and Gibson, "The Road of Foreign Policy", dalam *Politik Internasional (Konsep dan Teoritis)*, Dahlan Nasution, (Jakarta: PT. Erlangga,1989), hal.26.

pemilihan umum. Kandidat dari partai mayoritas cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangi pemilihan karena besarnya dukungan dari partai mayoritas daripada kandidat dari partai minoritas.¹³

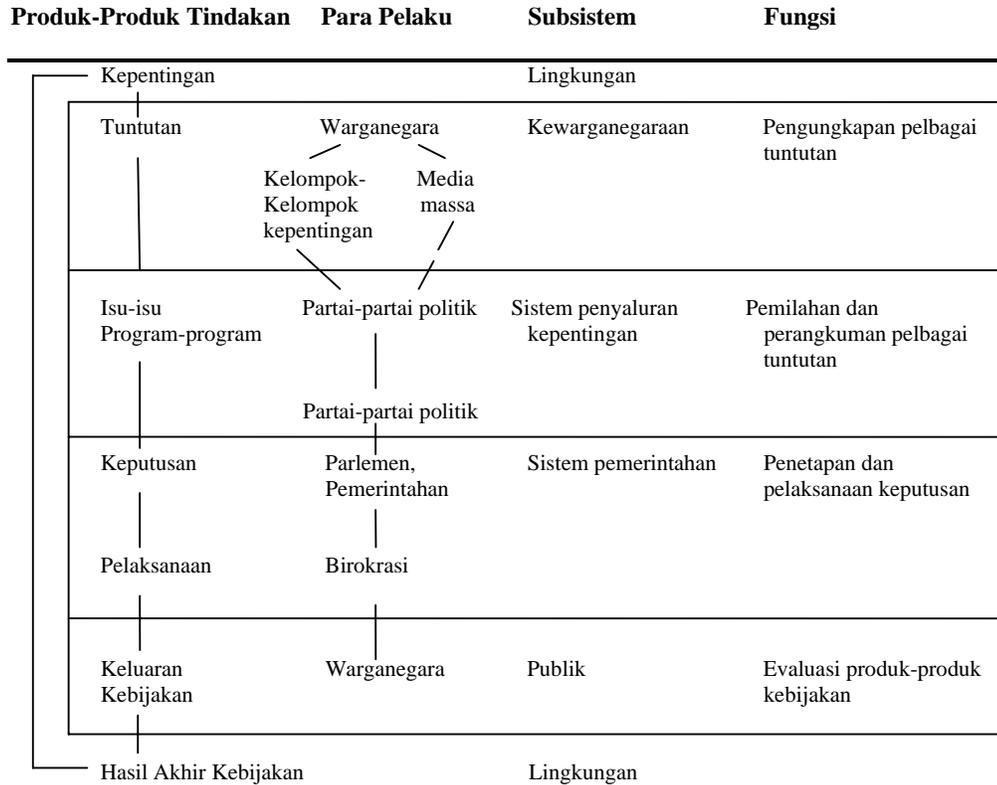
Dalam mengeluarkan suatu tawaran program kebijakan, partai-partai memilah berbagai kehendak warganegara yang kemudian mengubah beraneka ragam kehendak itu menjadi isu-isu politik dengan jalan menyusun sejumlah alternatif kebijakan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan masing-masing partai. Dengan cara demikianlah partai-partai politik merangkum berbagai kehendak menjadi paket-paket kebijakan yang runtut dan longgar, sebuah proses yang menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih dalam pemilu.

Partai-partai politik juga harus siap dan mampu menerima kritikan masyarakat apabila kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Proses daur ulang kebijakan kemudian menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi sistem kerja partai politik tersebut dalam menyusun suatu kebijakan agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, peranan partai-partai dalam penyusunan kebijakan yang demokratis adalah seperti yang digambarkan oleh Dieter Fuchs dalam bentuk bagan mengenai proses demokratisasi formal sebagai berikut :

¹³ Bambang Cipto, *Diktat Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Fisipol UMY, 1992) hal.22.

Bagan 1

Model untuk Proses Demokratisasi Formal



Sumber: Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert dan Ian Budge, *Parties, Policies, and Democracy* (Oxford, UK: Westview Press, Inc., 1994).

Pada bagan diatas menjelaskan tentang bagaimana suatu proses demokratisasi formal terjadi. Intinya bagaimana suatu kepentingan menjadi sebuah hasil akhir kebijakan. Kepentingan-kepentingan dalam masyarakat diubah menjadi tuntutan-tuntutan warganegara. Tuntutan-tuntutan tersebut terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan media massa yang berfungsi sebagai pengungkapan tuntutan-tuntutan yang bergerak di lingkungan kewarganegaraan. Kemudian tuntutan-tuntutan tersebut dipilah oleh partai-partai politik yang berfungsi sebagai sistem atau media penyaluran tuntutan atau kepentingan tersebut. Partai-partai politik sedemikian rupa mengemas

kepentingan tersebut sehingga menjadi isu-isu. Dengan sendirinya mereka pun mengemukakan sejumlah cara alternatif untuk memenuhi tuntutan dan mengangkat berbagai persoalan yang tercakup di situ. Akan tetapi, partai-partai biasanya tidak hanya dihadapkan pada satu isu saja tetapi pada berbagai ragam isu yang diangkat ke arena kebijakan oleh partai-partai dan pesaingnya. Untuk menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih, partai-partai politik berusaha menciptakan penawaran-penawaran atau memberikan solusi yang pasti sebagai jalan keluarnya. Di saat berbagai partai itu menyajikan satuan-satuan isu dan solusi yang berbeda-beda kepada para pemilih, maka para pemilih pun bisa menetapkan pilihan. Mereka bisa memilih satu agenda kebijakan yang ditawarkan oleh partai-partai tersebut yang lebih mampu menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang mereka inginkan.

Ketika pilihan telah ditetapkan, partai-partai tersebut harus menjalankan peranannya dalam pemerintahan dengan merealisasikan program kebijakan yang telah dijanjikan. Pada akhirnya, warganegara dihadapkan pada hasil-hasil akhir kebijakan yang akan mereka evaluasi. Dan pada gilirannya, evaluasi ini mempengaruhi konfigurasi pelbagai kepentingan, yang mendorong terjadinya daur proses kebijakan lainnya.

Dalam upaya memperoleh suara terbanyak dan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai partai pemerintah yang berkuasa sejak tahun 1995, Partai Union for a Popular Movement (UMP) berusaha mengeluarkan program-program kebijakan partai yang cenderung mendapat dukungan penuh dari rakyat Perancis. Salah satu program kebijakan utama Partai Union for a Popular Movement adalah

menolak referendum Konstitusi Uni Eropa tanggal 29 Mei 2005 yang bertujuan untuk mengintegrasikan secara penuh negara Uni Eropa tersebut. Partai UMP sangat menentang Konstitusi tersebut karena bertentangan dengan keinginan rakyat Perancis. Partai UMP akan berjanji untuk merealisasikan kebijakan itu apabila berhasil memenangkan pemilu.

Perancis merupakan Negara yang memiliki sikap etatisme yang sangat tinggi yaitu sikap yang mendahulukan kepentingan Negara daripada kepentingan rakyatnya. Partai-partai politik di Perancis menggunakan prinsip tersebut dalam mengeluarkan program-program kebijakan partai. Namun tidak demikian dengan Partai Union for a Popular Movement yang dipimpin oleh Nicolas Sarkozy saat ini. Sarkozy berani melawan prinsip tersebut dengan berjanji akan melakukan perubahan-perubahan yang berarti demi kemajuan Perancis di masa mendatang. Sikap seperti itulah yang didambakan oleh rakyat Perancis saat ini yang memiliki keanekaragaman etnis di dalam negaranya itu.

D. Hipotesa

Kemenangan Nicolas Sarkozy pada Pemilu Presiden Perancis tahun 2007 dipengaruhi oleh:

1. Program kebijakan yang ditawarkan oleh Nicolas Sarkozy yang lebih menfokuskan masalah ekonomi terutama masalah imigran yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Perancis karena masalah imigran merupakan masalah yang sangat krusial di Perancis saat ini.

2. Reputasi Nicolas Sarkozy sebagai Menteri Dalam Negeri dinilai baik dalam masa kepresidenan Jacques Chirac.
3. Dukungan penuh rakyat Perancis atas program kebijakan partai Nicolas Sarkozy, Union for a Popular Movement yang menentang rencana Turki masuk keanggotaan Uni Eropa. Hal itu juga didasarkan atas penolakan rakyat Perancis terhadap Referendum Konstitusi Uni Eropa tanggal 29 Mei 2005.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar dalam menganalisa permasalahan lebih tajam dan terfokus. Jangkauan waktu penelitian ini adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum Presiden Perancis tahun 2007. Namun, tidak menutup kemungkinan, untuk mendukung skripsi ini penulis juga menggunakan data-data dan informasi dari tahun-tahun sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisa permasalahan, penulis menggunakan metode *library research* untuk pengumpulan data. Namun karena permasalahan yang diteliti adalah tergolong masalah yang baru saja terjadi maka penulis lebih menggunakan metode *website browsing* atau pengumpulan data melalui internet. Selain itu penulis juga mengolah data-data dari majalah dan surat kabar.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pemilu Presiden Perancis 2002 dan Dinamika Pemerintahan Jacques Chirac Pasca Terpilih Kembali yang akan menjelaskan tentang rendahnya partisipasi rakyat Perancis terhadap Pemilu Presiden tahun 2002 dibandingkan tahun 2007 dan penurunan dukungan rakyat Perancis terhadap Pemerintahan Jacques Chirac akibat masalah perekonomian terutama pada tahun 2005.

BAB III Pemilihan Umum Presiden tahun 2007. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang partai-partai politik yang ikut pemilu presiden tahun 2007, mekanisme pemilihan umum presiden Perancis tahun 2007 dari proses pendaftaran dan penentuan calon, kampanye, prosedur pemberian suara, hasil pemilu putaran pertama dan terpilihnya Nicolas Sarkozy dan Segolene Royal pada pemilu putaran kedua serta hasil pemilu putaran kedua.

BAB IV menjelaskan tentang faktor-faktor kemenangan Nicolas Sarkozy dalam pemilihan umum Presiden tahun 2007 yang membawa dirinya menjadi Presiden Perancis yang baru.

BAB V berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.